



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROGER
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 442870

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.623.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 778.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1058 m2/84 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/54 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MENTAWAI, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 32.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11BF1DA/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 41.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.018.050

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.702.818.050

III. HUTANG Rp. 116.475.120

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.586.342.930

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.